

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 1) Mekanisme perencanaan APBDes di Desa Bena telah dilaksanakan dengan sistematis, berjenjang, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses tersebut telah terbangun sinergi vertikal, horizontal, dan internal. Namun, ketiga bentuk sinergi tersebut berada pada posisi yang belum seimbang, di mana sinergi vertikal cenderung lebih dominan sehingga membatasi fleksibilitas sinergi horizontal dan internal dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- 2) Ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan regulasi pemerintah dalam proses perencanaan APBDes di Desa Bena terjadi akibat perbedaan orientasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Aspirasi masyarakat yang bersifat kebutuhan *riil* lokal sering kali tidak dapat diakomodasi karena keterikatan pemerintah desa pada regulasi dan preferensi pengelolaan keuangan deesa, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas pada tahap penyampaian aspirasi.
- 3) Strategi sinergi yang direkomendasikan dalam proses perencanaan APBDes di Desa Bena merupakan upaya adaptif untuk mengatasi ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan regulasi pemerintah. Strategi tersebut mencakup pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait preferensi penggunaan Dana Desa, penyeimbangan antara kebutuhan pusat dan kebutuhan lokal, pelaksanaan musyawarah bersama

sebelum penetapan anggaran, serta pencapaian kesepakatan bersama sebagai dasar legitimasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan strategi penjadwalan penggunaan Dana Desa berbasis waktu, optimalisasi program ketahanan pangan, serta pemanfaatan program penurunan stunting sebagai substitusi fungsional pembangunan jalan mampu menjadi titik temu antara kepatuhan terhadap kebijakan pusat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa Bena.

6.2 Saran

- 1) Pemerintah Desa Bena memperkuat kualitas partisipasi masyarakat dalam proses APBDes, tidak hanya pada tahap penjangkauan aspirasi, tetapi juga dalam penentuan prioritas akhir kegiatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan batasan regulasi sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang memadai dan dapat menyampaikan usulan yang lebih realistis serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemerintah Desa Bena mengembangkan mekanisme penyelarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan lokal secara lebih adaptif, guna mengurangi dominasi sinergi vertikal dalam perencanaan anggaran.
- 3) Pemerintah Desa Bena bersama BPD memperkuat andil sinergi internal dalam mekanisme perencanaan serta penetapan APBDes, khususnya dalam mengoordinasikan hasil musyawarah masyarakat dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Penguatan sinergi internal ini penting agar mampu merumuskan kebijakan anggaran yang kontekstual, responsif, dan valid di mata masyarakat..